



bermanfaat. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor: 13 tahun 1998 Kesejahteraan Lanjut Usia juga menegaskan bahwa pemerintah juga berkewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi lanjut usia agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. Mewujudkan dan memelihara taraf kesejahteraan dapat pula diartikan sebagai upaya untuk memperpanjang usia harapan hidup, penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia agar dapat menikmati taraf hidup yang wajar.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 B ayat (2) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial dimana salah satu bentuk jaminan sosial berupa bantuan sosial/ subsidi pemenuhan kebutuhan dasar. Selain itu menurut Penjelasan Pasal 1 angka 1 huruf b Undang-undang Nomor: 4 tahun 1979 yang menjadi kebutuhan dasar/ pokok tersebut salah satunya adalah kebutuhan pangan.

Sejalan dengan perkembangan masalah dan kebutuhan penyandang cacat/ disabilitas miskin dan penyandang cacat/ disabilitas terlantar, lanjut usia miskin dan lanjut usia terlantar, dan anak yatim, piatu, dan yatim piatu dari keluarga miskin dipandang perlu adanya suatu upaya yang dapat

























